

**KOORDINASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
KAMPAR DALAM PENYELESAIAN MASALAH PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**Oleh : Indah Wahyuni**

indah.wahyuni@student.unri.ac.id

**Pembimbing : Dr. Adianto, S.Sos M. Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*The administration of village governance is inseparable from the organization of good coordination between village officials. Village government is the leading in service to the community and a strategic spearhead for the success of all programs. Therefore, efforts to strengthen villages are a step to accelerate the realization of people's welfare as regional autonomy. So that the administration of village governance is a sub system of governance, so that the village has the authority to regulate and manage the interest of it people. The purpose of this research is to find out how the coordination carried out by the village and village empowerment agency Kampar regency in solving the problem of village governance and what factors are the obstacles. As for the theory used in this study is coordination by Koonz, O'Donnell and Fayol, namely cooperation, division of tasks, communication, meeting meetings. This study uses qualitative research, with a phenomenological approach obtained through interviews, observations and documentation. The result of this study indicate that, firstly the coordination in solving the problem of the implementation of village government as whole has not run optimally. Both in kooperatif, division of tasks, communication and in meetings there are still obstacles encountered. The two factors which become obstacles in coordinating the resolution of the problem of village governace are limited human resources and budget constraints.*

***Keywords: Coordination, Organiation and village government***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Kabupaten Kampar mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor pertanian secara

umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi, perbankan serta pariwisata. Sesuai dengan visi "Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri berbasis pertanian dan perkebunan masyarakat yang berakhlak, berbudaya dan beradab menuju masyarakat sejahtera". Dengan salah satu Misi yaitu "meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan

pelayanan masyarakat. Sebaiknya aset ini dapat dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Mengingat pentingnya pengelolaan aset daerah, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan aset secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar adalah sumber daya mineral yang beragam. Selain itu sumber daya manusia (SDM) mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting yaitu sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berkaitan dengan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini yang disebabkan oleh karena kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan koordinasi yang baik antar aparatur desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang mempunyai tugas pokok satu sama lain. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Apa yang terjadi apabila sekretaris desa menjadi ganjalan kepala desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Dan pasal 27 ayat 1 menyatakan Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan

secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lokus penelitian ini pada Desa Sipungguk berdasarkan tabel 1.2 ditemukan sejumlah kondisi yang terjadi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Desa Sipungguk Kecamatan Salo merupakan desa yang masalahnya belum terselesaikan sampai sekarang sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Dimana ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa dikarenakan kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dikarenakan masih belum adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada saat penggunaan dana untuk pembuatan ataupun pembangunan desa. Kurangnya musyawarah yang melibatkan masyarakat, serta tidak ada keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan baik segi sarana maupun prasarana, tidak adanya informasi atau pemberitahuan rencana penggunaan anggaran ataupun sosialisasi dari pemerintah desa.

Hasil observasi awal ditemukan banyaknya laporan surat masuk dari masyarakat Sipungguk mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini yang membuat masyarakat Sipungguk bingung dan bertanya-tanya apakah pengelolaan keuangan dilakukan secara tepat dan profesional atau mungkin disalahgunakan oleh beberapa pihak. Kepala desa otoriter dalam mengambil kebijakan, otoriter yang dimaksud disini memaksakan kehendak harus mengikuti dan menerima keputusan kepala desa tersebut. Lemahnya komunikasi dan koordinasi disini ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar kurang memberikan dan melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa Sipungguk mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didesa terlebih dahulu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan pihak kecamatan, apabila pihak kecamatan tidak bisa menyelesaikannya maka permasalahan tersebut naik ke tingkat Kabupaten di tingkat Kabupaten yang akan menyelesaikannya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pemerintah memakai alur birokrasi makanya Dinas terlebih dahulu menyurati kecamatan agar supaya pihak kecamatan tidak merasa dilangkahi. Surat yang masuk dari masyarakat terlebih dahulu dicek seperti apa pengaduannya, akurasi kebenaran dari laporan, apabila tidak sesuai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa buka regulasi ada kolom regulasinya. Kerap terjadinya miss coordination (kesalahan dalam berkoordinasi) seperti belum proaktifnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan informasi kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Yang dikoordinasikannya itu berupa pelatihan, pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan benar agar kepala desa tidak salah dan keliru dalam membuat laporan keuangan, disini kepala desa harus sering berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Musyawarah dalam penyusunan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan dilakukannya koordinasi seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Dalam Penyelesaian

Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menghambat koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis adalah penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
- b. Manfaat Praktis adalah penelitian ini dapat menjadi masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

## 1.1 TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1.1 Organisasi

James D. Mooney dalam Feriyanto dan Shytatriana (2015: 25) mengungkapkan definisi organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Soffer dalam Subkhi dan Jauhar (2013: 3) mengatakan bahwa organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dimana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi beberapa bentuk hasil. Siagian (2008: 95) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut maka organisasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain:

#### a. Organisasi sebagai wadah

Organisasi adalah suatu wadah tempat beraktifitas untuk mewujudkan suatu tujuan.

#### b. Organisasi sebagai suatu proses

Organisasi sebagai suatu proses interaksi dan hubungan antara individu-individu didalam organisasi dalam melaksanakan kerjasama, dimana masing-masing individu tersebut mempunyai bagian kerja masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

#### c. Organisasi sebagai alat dalam pencapaian tujuan

Organisasi adalah suatu alat dalam pencapaian tujuan, dan tujuan organisasi akan tercapai bila tiap-tiap individu yang ada didalam organisasi tersebut mempunyai kesadaran akan tugas dan wewenangnya sehingga tujuan organisasi akan tercapai.

Dimock dan Dimock dalam Sadad (2014: 53) mengatakan bahwa organisasi ialah penyatuan secara sistematis bagian yang saling

bergantung bersama-sama guna membentuk suatu tujuan yang bulat melalui kekuasaan, koordinasi, dan pengawasan dapat dijalankan untuk mencapai maksud tertentu. Istilah dari bagian-bagian yang bergantung mempunyai pengertian bahwa, organisasi yang terdiri dari orang-orang yang dipimpin serta yang digerakkan, dan segala kegiatan aktivitas kerjanya terkoordinasi sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sadad (2014: 53) mengatakan bahwa titik perhatian dari organisasi adalah orang-orang yaitu sejumlah perilaku individu yang saling berinteraksi dan bekerjasama secara terkoordinasi melalui pengaturan terhadap berbagai tindak, dan dilakukan dengan sadar dimana setiap anggota yang terlibat di dalamnya harus memahami betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi

Thoha (2009: 117) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu kolektivitas yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektivitas tersebut berstruktur, terbatas, dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektivitas-kolektivitas lainnya. Weber dalam Thoha (2009: 113) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang struktur didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Barnard dalam Thoha (2009: 114) mengatakan bahwa organisasi itu adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Caplow dalam Thoha (2009: 114) mengatakan bahwa pola-pola institusi yang ada memungkinkan suatu sistem aturan-aturan kantor untuk lebih kurang menjadi tetap dan mantap dinamakan organisasi. Pola macam ini dapat dikenali dengan suatu harga kekayaan sebagai berikut: mempunyai identitas, mempunyai

kelangsungan, mempunyai jadwal kerja (calendarity) dan mempunyai otoritas. Exiomi dalam Thoha (2009: 115) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Scot dalam Thoha (2009: 116) juga mengatakan bahwa organisasi konsepsinya organisasi itu diciptakan sebagai suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan. Menurut Scott, adalah akan lebih jelas persoalannya bahwa organisasi itu bagaimanapun adanya mempunyai gambaran prospek yang jelas, dan berbeda dari sekedar kekhususan tujuan atau kelangsungan aktivitas.

Robbins dalam Sobirin (2007: 5) mengatakan organisasi adalah unit social yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relative lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Cerrington dalam Sobirin (2007: 5) mengatakan organisasi adalah sistem social yang mempunyai pola kerja yang teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Daft dalam Sobirin (2007: 6) mengatakan bahwa organisasi adalah unit social atau entitas social yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relativ lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. Dale dalam Subkhi dan Jauhar (2013: 3) mengatakan organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok.

Lubis dalam Husneini (2009: 5) mengatakan organisasi adalah suatu kesatuan

sosial dari sekelompok individu (orang), yang saling berinteraksi menurut pola yang terstruktur dengan cara tertentu sehingga setiap individu anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dan juga mempunyai tujuan tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

### **1.1.2 Koordinasi**

Koordinasi adalah proses pengintegrasian aktivitas pada satuan-satuan terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efisien. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disuatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain.

Leonard D. White dalam Kencana (2011: 33) koordinasi adalah penyesuaian diri pada masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta pengoperasian bagian-bagian waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Benn dalam Sutarto (2009: 142) mengatakan koordinasi dibagi menjadi dua yaitu: pertama adalah suatu kelangsungan, keharmonisan, mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Kedua yaitu penyusunan usaha-usaha kelompok dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Herujito (2011: 122) koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin

agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Semakin besar ruang lingkup suatu organisasi, semakin terasa betapa pentingnya masalah koordinasi. Koordinasi menghubungkan kegiatan-kegiatan berbagai macam cabang pekerjaan, yang menjamin terlaksananya garis politik yang ditentukan dan menghadirkan perselisihan dan kepentingan.

Koontz dan O'Donel dalam (Sutarto, 2006: 114) menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.
- c. Adanya pertemuan melalui rapat-rapat.

Untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik Fayol dalam (Sutarto, 2006: 114) berupa:

- 1) Antara unit dan sub unit lainnya bekerjasama dengan serasi.
- 2) Masing-masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerjasama dengan unit lainnya.
- 3) Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan dirin dengan jeda waktu kerjasama dengan unit atau sub unit lainnya.

Terry dalam Hasibuan (2009: 85) mengatakan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasibuan (2010: 85) mengatakan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi sangat penting dalam sebuah koordinasi, ini disebabkan karena:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, atau kekosongan pekerjaan.

2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen dan semua pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi pada sasaran yang diinginkan.

Djamin dalam Hasibuan (2011: 86) menyatakan koordinasi sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Ada dua tipe koordinasi menurut Hasibuan (2008: 86) yaitu:

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi ini terbagi atas:
  - a. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan

tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

- b. *Interrelated* adalah koordinasi antara badan instansi, unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, secara intern maupun ekstern levelnya setara, koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Manullang (2008: 12) mengatakan bahwa *coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelarasakan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja yang sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi intruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan bimbingan atau nasihat dan mengadakan *coaching* (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran. Masih dalam Manullang (2008: 66) didalam sebuah organisasi, untuk menjalankan kegiatan organisasi dibutuhkan koordinasi yang baik. Agar koordinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, suatu organisasi harus membuat pembagian kerja agar tidak terjadinya tumpang tindih tugas.

Moony dalam Brantas (2009: 48) menyatakan untuk merancang organisasi perlu diperhatikan kaedah dasar yaitu:

1. Koordinasi, syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin.
2. Prinsip scalar, proses scalar mempunyai prinsip, prospek, dan pengaruh sendiri

yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi, dan definisi fungsional.

3. Prinsip fungsional, adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda.
4. Prinsip staff, kejelasan perbedaan staf dan lini.

Yohanes Yahya (2006: 85) mengatakan bahwa koordinasi adalah mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan pada bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi. Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011: 86) koordinasi diartikan sebagai salah satu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyalurkan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Daft (2010: 30) mengatakan koordinasi adalah hasil dari informasi dan kerja sama. Koordinasi mengacu pada kualitas kolaborasi diantara departemen. Tanpa adanya koordinasi, bagian-bagian perusahaan tidak akan bergerak dengan selaras, sehingga akan menimbulkan permasalahan dan konflik.

### **1.1.3 Pemerintahan Desa**

Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surasih, (2012: 23) mendefinisikan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

H.A.W. Widjaja (2013: 3) dalam bukunya "Otonomi Desa" Pemerintahan Desa diartikan sebagai: "penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dra. Sumber Saporin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pambudi, (2012: 50) pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintah desa. Awang (2010: 45) pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Widjaja (2013: 3) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD". Soemantri (2011: 157) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:



- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa.
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian

kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Penelitian kualitatif ini berusaha menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kaitanya dengan Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian diperoleh, maka hasil data-data tersebut dikelompokkan, diklasifikasikan dengan dianalisa sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan. Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa.

Data yang diperoleh langsung dari informan lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu *state* (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), (Kecamatan Salo), Pemerintah Sipungguk dan *civil society* (masyarakat).

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Renstra Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.
4. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupten Kampar.
5. Profil Desa Sipungguk.
6. Literatur, Dokumen dan Skripsi.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan desember 2018 sampai dengan agustus tahun 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah terpilih oleh peneliti sebagai narasumber ataupun

informan-informan dalam penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

### 1. Observasi (Pengamatan)

Teknik ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pengamatan ini peneliti di perkuat dengan adanya data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun *soft copy* yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi ini dilakukan dari 12 Desember 2018 hingga 23 Agustus 2019.

### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan secara bertahap berdasarkan urutan informasi yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survei kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan dilapangan. Wawancara dilakukan dari 10 sampai dengan 23 Agustus 2019.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Kamera/Telepon Seluler: untuk memotret kegiatan yang berkaitan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. Recorder Telepon Seluler: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

### 3. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, penelitian juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 12 Desember 2018 sampai 22 Agustus 2019.

1. Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
2. Foto hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan aktifitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian. Hasil penelitian harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada intinya analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai

pengumpulan data dalam waktu tertentu. Setelah itu hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menganalisis selama dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada empat tahapan lain sebagai berikut:

#### 1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti adalah kegiatan dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari tujuh responden. Selanjutnya pengumpulan data dengan dokumentasi. Data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti koran, makalah) ataupun dokumen *private* seperti buku harian, diary, surat, e-mail. Selain itu melakukan observasi penelitian dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti.

#### 2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan menelaah data yang tersedia diberbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkup data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat

ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

### **3. Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

#### **4.1.1 Kerjasama**

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempengaruhi tugas dan tujuan yang sama. Kerjasama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam sebuah instansi atau lembaga kerjasama tim telah menjadi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kerjasama tim akan menjadi suatu dorongan sebagai

energi maupun motivasi bagi setiap individu yang tergabung dalam sebuah tim kerja. Jika kerjasama dapat berjalan dengan baik, maka kelancaran berkomunikasi maupun rasa tanggung jawab pada setiap individu yang ada di dalam tim kerja akan tertentu

#### **4.1.2 Pembagian Tugas**

Hasil analisis mengenai pembagian tugas dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa Sipungguk dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pembagian tugas pada setiap instansi sudah jelas. Setiap instansi sudah ada bidang-bidangnya sendiri. Namun untuk pembagian tugas di Desa Sipungguk dan BPD belum terealisasi. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengerti prosedur. Seharusnya pemerintahan Sipungguk memberikan petunjuk agar masyarakatnya paham dan mengerti seperti apa prosedur sebenarnya. Sebaiknya BPD Sipungguk itu mereka yang tidak sibuk dan tidak kerja diluar kota agar nanti masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kepada BPD tidak kesulitan dan menunggu lama.

#### **4.1.3 Komunikasi**

Hasil analisis mengenai komunikasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar instansi yang berkoordinasi dalam keadaan baik. Komunikasi yang terjadi juga merupakan komunikasi dua arah. Selain itu juga komunikasi yang dilakukan bersifat umpan balik. Namun tetap harus ditingkatkan lagi agar hasil yang maksimal dapat tercapai. Setiap sosialisasi yang melibatkan pihak lain selalu dikomunikasikan. Komunikasi berharap agar instansi-instansi dapat cepat tanggap dan agar kerjasama yang dibangun dapat mencapai tujuan yang diinginkan lebih efektif dan efisien.

Sebuah koordinasi tidak akan utuh tanpa adanya komunikasi antar instansi. Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya koordinasi yang baik. Keberhasilan dari koordinasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi yang

baik akan mendukung terjadinya kerjasama yang baik diantara instansi yang terkait. Komunikasi ini sangat penting. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi.

#### **4.1.4 Pertemuan Rapat**

Hasil analisis mengenai pertemuan rapat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan rapat koordinasi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya rapat koordinasi yang terstruktur. Rapat koordinasi yang terstruktur hanya dimiliki DPMD sebanyak 3 kali dalam satu bulan. Untuk Kecamatan Salo dan Pemerintahan Sipungguk sendiri belum ada. Rapat koordinasi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setiap instansi dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan adanya rapat koordinasi setiap instansi juga dapat bertukar informasi agar penyelesaian masalah dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dan masyarakat Sipungguk juga dilibatkan dalam rapat jika masyarakat dibutuhkan, untuk BPD nya terkadang tidak dilibatkan sebaiknya kepala desa mengundang BPD karena kalau tidak ada BPD pemerintahan itu tidak akan berjalan

### **4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengawasan Standar Angkutan Laut di Kota Pekanbaru**

#### **4.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

di DPMD jumlah sumberdaya manusia sudah mencukupi dan pembagian kerjanya sudah jelas. Berbeda dengan pihak Kecamatan Salo jumlah sumberdaya manusianya masih belum mencukupi. Adanya keterbatasan Aparatur Pemerintah menyebabkan belum adanya yang mengerti dan membina tentang bidang pemerintahan desa di tingkat kecamatan Salo. Dan Desa Sipungguk juga belum memadai baik itu dari segi kualitas sumber daya manusianya maupun dilihat dari kuantitas sumber daya manusianya.

Kekurangan sumberdaya manusia bisa mengganggu berjalannya roda pemerintahan. Sebaiknya pemerintahan desa Sipungguk merekrut sumber daya manusianya sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa secara menyeluruh belum berjalan dengan maksimal. Baik dalam kerjasama, pembagian tugas, komunikasi maupun dalam rapat masih ada kendala yang dihadapi. Dalam kerjasama pihak terkait merasa lebih maksimal lagi dikarenakan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa ini lebih bersifat situasional maka kerjasama harus ditingkatkan lagi. Dalam pembagian tugas dirasa sudah maksimal dan setiap instansi juga sudah meaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam hal komunikasi dan rapat koordinasi memang harus dimaksimalkan lagi dikarenakan dalam komunikasi hanya sebatas mengundang sosialisasi saja. Sedangkan untuk rapat koordinasi pihak Kecamatan Salo dan Pemerintahan Sipungguk belum memiliki jadwal yang terstruktur rapat yang dilakukan lebih bersifat situasional dalam melakukan rapat koordinasi, hanya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar yang memiliki jadwal yang teratur dalam melakukan rapat koordinasi yaitu 3 kali dalam 1 bulannya.

b. faktor- faktor yang menghambat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa adalah: Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan dalam koordinasi penyelesaian masalah

penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti jumlah pegawai yang masih sedikit, sehingga menghasilkan kinerja yang kurang optimal. Keterbatasan anggaran, anggaran yang belum sepenuhnya memadai untuk turun langsung kedesa-desa pelosok dan masih tertinggal yang ada di Kabupaten Kampar memang itukan perlu anggaran.

### 6.1 Saran

1. Perlu adanya sinergitas dan peningkatan hubungan kerjasama yang baik antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan instansi lainnya baik itu pihak kecamatan Salo, pihak pemerintahan desa Sipungguk dll. Terutama mulai membangun kerjasama dengan pemerintahan Sipungguk. Karena semua instansi ini memiliki peran yang penting dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun hanya sebatas partner dalam kerjasama dalam penyelesaian masalah ini.
2. Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar membuat program untuk peningkatan Sumberdaya Manusia untuk kepala desa, perangkat desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar lebih sering lagi turun ke desa-desa yang memiliki permasalahan pemerintahan desa, mencari tahu dulu bagaimana permasalahannya jangan langsung menerima pengaduan dari masyarakatnya dicek kebenaran laporannya. Setelah turun kedesa-desa tersebut baru nanti dimintai satu-satu keterangannya mulai dari kepala desa, perangkat desa dan BPD nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Awang, Azam (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daft, Richard L. (2010). *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Feriyanto, Andri & Endang Shytatriana. (2015). *Pengantar Manajemen (3 in 1 untuk Mahasiswa dan Umum)*. Yogyakarta: Mediatara.
- Hanif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- H.A.W, Widjaja (2013). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan. (2010). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S,P. (2010). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herujito. (2011). *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hunawan ,Pambudi (2012). *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*: Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Inu Kencana (2011). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Luankali, Bernadus. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maria, Eni S. (2012). *Pemerintah Desa dan implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Sadad, Abdul. (2014). *Organisasi dan*

*Manajemen*. Pekanbaru: Alaf Riau

Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subkhi Akhmad, Jauhar Muhammad. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sutarto. (2006). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Sobirin, Achmad. (2007). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Soemantri, Bambang (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.

Thoha, Miftah (2009). *Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Press.

Yahya, Yohanes. (2006). *Pengertian Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta: Galan Press.

#### **Jurnal:**

Dedy Setiawan. (2017). Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2015.

M. Firmansyah. (2014). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri (Studi Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara).

Rida Azhari. (2017). Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Hilir Kabupaten Tana Tindung.

Sudi Rohman. (2017). Koordinasi Camat Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.

#### **Skripsi:**

Jaka Satria. (2017). *Koordinasi Pemeliharaan Kualitas Mutu Gambir Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*.

Nilu Sari. (2017). *Koordinasi Pelaksanaan Job Expo oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru*.

Nopes Scorpion. (2014). *Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo Jaya Kabupaten Kuantan Singingi*.

#### **Dokumen:**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

Renstra Kabupaten Kampar Tahun 2017-2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.